

**ANALISIS PEMETAAN POTENSI PAJAK DAERAH
DI KOTA PAYAKUMBUH**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah
Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

ANNISA NADIYAH

2015/15133005

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PEMETAAN POTENSI PAJAK DAERAH
DI KOTA PAYAKUMBUH**

Nama : Annisa Nadiyah
NIM : 15133005
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

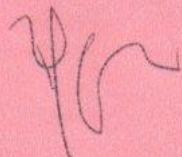
Padang, Agustus 2018

Diketahui oleh,

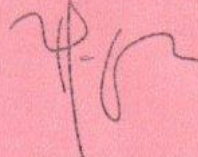
Disetujui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi

Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

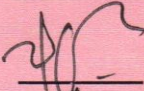
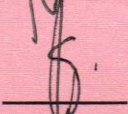
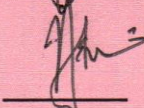
**ANALISIS PEMETAAN POTENSI PAJAK DAERAH
DI KOTA PAYAKUMBUH**

Nama : Annisa Nadiyah
NIM : 15133005
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2018

Tim Penguji

Nama	TandaTangan
Halkadri Fitra SE, MM, Ak.	(Ketua) 
Salma Taqwa, SE, M.Si.	(Anggota) 
Herlina Helmy, SE, MS. Ak.	(Anggota) 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Nadiyah
BP/NIM : 2015/15133005
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 15 Maret 1997
Program Studi : Akuntansi (D3)
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Bangau No.12 Air Tawar Barat. Padang.
Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kota
Payakumbuh

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau di terbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2018

Yang menyatakan,



Annisa Nadiyah

BP/NIM. 2015/15133005

ABSTRAK

Nama/NIM : Annisa Nadiyah/15133005
Judul Tugas Akhir : Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Di Kota Payakumbuh
Pembimbing : Halkadri Fitra, SE. MM, Ak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tergolong ke dalam kategori manakah pajak daerah di Kota Payakumbuh, apakah tergolong kategori Prima, Potensial, Berkembang, atau bahkan Terbelakang. Untuk mengetahui kategori tersebut maka dilakukan pemetaan terhadap potensi pajak daerah di Kota Payakumbuh dengan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Peneliti mengumpulkan data dalam bentuk angka yaitu data realisasi pajak daerah dari Badan Keuangan Daerah di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil yang didapat, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Pajak Daerah Kota Payakumbuh sekitar 20% termasuk dalam kategori prima yaitu pajak penerangan jalan, sedangkan untuk kategori potensial pajak daerah kota payakumbuh mencapai 20% yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, untuk kategori berkembang mencapai 10% yaitu pajak reklame, dan pajak daerah untuk kategori terbelakang mencapai 50% yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak air tanah.

Kata Kunci : Pemetaan, Pajak Daerah, Tipologi Klassen.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kota Payakumbuh”**. Selanjutnya shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Beliau telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang dan berteknologi canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembangkan ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat adanya bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dengan segala hormat, melalui lembar ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak selaku koordinator program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan juga sebagai pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
3. Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam berbagai hal.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.

5. Teristimewa kepada kedua orang tua beserta keluarga tercinta yang terus memberikan do'a dan dukungan penuh selama penulis dalam masa perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Terimakasih kepada para sahabat(Mega Silvia dan Rahmi Eka Putri) yang telah menjalani senang maupun susah bersama penulis selama tiga tahun ini.
7. Terimakasih kepada sahabat Jajuli Abdul Hakim yang selalu memberikan dukungan, dan selalu menyemangati penulis.

Atas segala kemudahan yang telah diberikan oleh semua pihak diatas maka dengan tulus dan rendah hati penulis ucapkan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka berikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam Tugas Akhir ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan.

Padang, Agustus 2018

Penulis

Annisa Nadiyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Pendapatan Daerah.....	10
1. Pengertian Pendapatan Daerah.....	10
2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	11
B. Pendapatan Asli Daerah	12
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	12
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	13
C. Pajak Daerah	13
D. Potensi Pendapatan Asli Daerah	24
E. Penghitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah	28
F. Analisis Tipologi Klassen	28
G. Pemetaan	31
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	34
A. Bentuk Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
1. Lokasi Penelitian.....	34
2. Waktu Penelitian.....	34
C. Rancangan Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian	34

2. Tahap Penelitian	35
3. Objek Penelitian.....	35
4. Sumber Data	35
5. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN	37
A. Profil Daerah Kota Payakumbuh	37
1. Sejarah Kota Payakumbuh.....	37
2. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh	39
B. Hasil Penelitian	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017	2
Tabel 1.2	Tabel Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh serta Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 – 2017.....	3
Tabel 1.3	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2013-2017	5
Tabel 1.4	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017	6
Tabel 2.1	Tabel Kategori Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen	29
Tabel 2.2	Tabel Rumusan Matriks Klasifikasi Potensi Penerimaan Pajak Daerah.....	32
Tabel 4.1	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Hotel	47
Tabel 4.2	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Hotel Kota Payakumbuh	47
Tabel 4.3	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Restoran.....	49
Tabel 4.4	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Restoran Kota Payakumbuh	49
Tabel 4.5	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Hiburan.....	50
Tabel 4.6	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Hiburan Kota Payakumbuh.....	51
Tabel 4.7	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Reklame.....	52
Tabel 4.8	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Reklame Kota Payakumbuh.....	53
Tabel 4.9	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Penerangan Jalan.....	54

Tabel 4.10	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Payakumbuh	54
Tabel 4.11	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Mineral Bukan Logam	56
Tabel 4.12	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam Kota Payakumbuh.....	56
Tabel 4.13	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Parkir	58
Tabel 4.14	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Parkir Kota Payakumbuh	58
Tabel 4.15	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Air Tanah.....	59
Tabel 4.16	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Air Tanah Kota Payakumbuh	60
Tabel 4.17	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	61
Tabel 4.18	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Payakumbuh	62
Tabel 4.19	Tabel Rata-rata dari $\frac{Y_i}{\bar{Y}}$ dan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$ Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	63
Tabel 4.20	Tabel Pemetaan Potensi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Payakumbuh	64
Tabel 4.21	Pajak Daerah Kota Payakumbuh Beserta Kategori yang Diperoleh Berdasarkan Hasil Pemetaan.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada saat itu sedang berada ditengah masa tranformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang hanya merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat telah memberikan kesempatan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk pengelolaan keuangan daerah dan serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian direvisi menjadi Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang hal yang sama.

Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2013 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan, yang artinya ialah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah perlahan-lahan bisa di minimalisasikan.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017

No	Tahun Anggaran	Total Pendapatan Asli Daerah
1	2013	54.177.723.838,25
2	2014	65.900.626.216,33
3	2015	87.526.250.571,29
4	2016	87.585.632.797,93
5	2017	99.130.459.836,60
TOTAL		394.320.693.260,40

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Salah satu penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu dari sektor pajak daerah. Namun, dulunya dalam penetapan objek pajak maupun dalam pemungutannya, banyak menimbulkan kendala dan ketidakjelasan yang memungkinkan akan timbulnya pengenaan berganda yang mengakibatkan proses pemungutan pajak tidak sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah membawa perubahan dalam pemungutan pajak, dan untuk perkembangan penerapannya, pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukannya perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi perekonomian dan perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar.

Dengan demikian, Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempurna terhadap Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997.

Pajak daerah di Indonesia menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 berikut, terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah di Kota Payakumbuh pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 realisasi pajak daerah mengalami kenaikan dari target yang ditentukan. Namun, pada tahun 2016 dan 2017 realisasi pajak daerah mengalami penurunan dari target yang ditentukan. Kontribusi pajak daerah terus meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh serta Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli daerah Tahun 2013-2017

No	Tahun Anggaran	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	% Kenaikan Realisasi dari Target	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
1	2013	5,727,365,778.00	7,110,931,746.00	24.16%	54,177,723,838.25	14%
2	2014	9,911,730,533.00	10,591,499,818.00	6.86%	65,900,626,216.33	17%
3	2015	9,976,794,885.00	10,765,420,224.00	7.90%	87,526,250,571.29	22%
4	2016	11,972,007,692.00	11,033,692,748.50	-7.84%	87,585,632,797.93	22%
5	2017	14,376,336,939.00	14,047,192,754.00	-2.29%	99,130,459,836.60	25%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, data yang diolah (2018)

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki lokasi strategis karena terletak pada jalur transportasi

perlintasan antar provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Payakumbuh yang mayoritas struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor perdagangan maupun sektor jasa, dari sektor perdagangan pada Kota Payakumbuh sendiri lebih banyak berasal dari industri-industri rumahan yang banyak membuat sulaman, bordiran, tenun tradisioanal, dan makanan khas daerah dari beras seperti batiah, beras rendang, dan gelamai, bahkan sulaman bordir dan songkok menjadi sektor unggulan dari Kota Payakumbuh yang telah mampu memenuhi pasar luar negeri, industri tersebut berada di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Utara. Sementara itu, untuk pengusaha makanan khas daerah baru mampu memasarkan produknya secara lokal yang masih terbentur pada masalah kemasan yang menentukan daya tarik dan daya tahan makanan. Untuk menjadi sentra perdagangan sarana pendukungnya yaitu empat unit pasar dan pusat pertokoan yang menampung kegiatan pedagang. Untuk sektor jasa sendiri kontribusinya berasal dari jasa pemerintahan sipil dan TNI/POLRI kemudian diikuti oleh sektor angkutan dan komunikasi. Pemerintah Kota Payakumbuh pun juga ikut andil dalam menunjang fasilitas untuk sektor-sektor tersebut seperti lahan parkir, pemberian lahan untuk membuka usaha, dan adanya fasilitas penerangan yang baik untuk sektor-sektor tersebut serta infrastruktur jalan juga mulai ditingkatkan kondisinya. Saat ini tengah dibangun jalan lingkaran luar bagian utara dan selatan yang menghubungkan Kota Pekanbaru dan Kota Bukittinggi yang disebut dengan Payakumbuh Bypass yang diharapkan mampu menunjang perekonomian Kota Payakumbuh. Termasuk mengalihkan

kepadatan lalu lintas di jalan nasional melalui pusat kota ke bagian utara dan selatan. Bila pembangunan jalan tadi selesai, Kota Payakumbuh mampu menangkap peluang wisata dengan melihat kondisi Kota Bukittinggi yang mulai kewalahan menampung tumpahan wisatawan domestik membuka peluang bagi Kota Payakumbuh mengembangkan perhotelan karena. Kondisi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian pada Kota Payakumbuh baik dari segi pendapatan masyarakat maupun dari segi pemungutan pajak daerah pada Kota Payakumbuh.

Berikut tabel kontribusi pajak daerah terhadap total pajak daerah Kota Payakumbuh kurun waktu lima tahun terakhir:

Tabel 1.3 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah Tahun 2013-2017

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	0,23%	0,16%	0,19%	0,14%	0,07%
2	Pajak Restoran	11,46%	9,56%	11,63%	16,35%	13,90%
3	Pajak Hiburan	3,35%	1,76%	1,62%	1,32%	1,11%
4	Pajak Reklame	2,98%	2,15%	2,42%	2,76%	2,35%
5	Pajak Penerangan Jalan	53,51%	41,66%	44,40%	45,11%	46,01%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	1,30%	2,46%	1,39%	1,22%	0,58%
7	Pajak Parkir	0,53%	0,00%	0,40%	0,16%	0,27%
8	Pajak Air Tanah	0,10%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00%	20,60%	17,74%	14,69%	13,15%
10	BPHTB	26,53%	21,59%	20,12%	18,18%	22,47%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, data yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total pajak daerah bervariasi. Elemen yang memberikan kontribusi terbesar pada Kota Payakumbuh di tahun 2013 yaitu pajak penerangan jalan sebesar 53.51% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar

26.53%. Sedangkan elemen yang memberikan kontribusi terkecil yaitu pajak air tanah sebesar 0.10% dan pajak hotel sebesar 0.23%.

Kontribusi jenis pajak daerah terhadap total pajak daerah sangat bervariasi dan peningkatan kontribusinya belum signifikan dan masih tergolong rendah.

Untuk kontribusi jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh dengan melakukan perbandingan realisasi komponen pajak daerah terhadap total PAD Kota Payakumbuh sehingga hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.4 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 1.4 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Payakumbuh Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%
2	Pajak Restoran	1,50%	1,54%	1,43%	2,06%	1,97%
3	Pajak Hiburan	0,44%	0,28%	0,20%	0,17%	0,16%
4	Pajak Reklame	0,39%	0,35%	0,30%	0,35%	0,33%
5	Pajak Penerangan Jalan	7,02%	6,70%	5,46%	5,68%	6,52%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	0,17%	0,40%	0,17%	0,15%	0,08%
7	Pajak Parkir	0,07%	0,00%	0,05%	0,02%	0,04%
8	Pajak Air Tanah	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00%	3,31%	2,18%	1,85%	1,86%
10	BPHTB	3,48%	3,47%	2,47%	2,29%	3,18%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, data yang diolah (2018)

Tabel kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh dihitung dengan membandingkan pajak daerah terhadap PAD yang menghasilkan persentase kontribusi setiap komponen pajak daerah terhadap PAD. Pada tabel kontribusi pajak daerah tersebut, memperlihatkan

minimnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mana belum banyak dari jenis pajak daerah tersebut yang mencapai angka satu persen. Ini bisa dikatakan bahwa masih sangat minimnya kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan melihat dari dua Tabel diatas (Tabel 1.3 dan Tabel 1.4) kontribusi pajak daerah masih perlu dilakukannya pengoptimalisasian pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh. Untuk meningkatkan pajak daerah tersebut pemerintah daerah tentunya perlu melakukan pengoptimalisasian dan melakukan perhitungan terhadap pajak daerah untuk dapat mengambil kebijakan yang tepat dan benar dalam menentukan skala prioritas dari jenis pajak daerah tersebut. Ketika skala prioritas dari pajak daerah telah ditentukan maka pemerintah daerah dapat meminimalisasikan pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai segala aktivitas dari pembangunan daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk meminimalisasikan biaya-biaya yang digunakan untuk mengembangkan jenis-jenis pajak yang dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu perlu dilakukannya perhitungan potensi pajak daerah guna untuk melihat berada dikategori mana pajak daerah tersebut apakah dalam kategori prima, potensial, berkembang atau dalam kategori terbelakang.

Dalam pemetaan potensi pajak daerah, setiap komponen pajak daerah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran kebijakan yang dapat dilakukan untuk setiap hasil dari pemetaan potensi pajak daerah tersebut. Untuk mengetahui potensi setiap komponen pajak daerah diperlukan analisis

potensi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMETAAN POTENSI PAJAK DAERAH DI KOTA PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan diuraikan adalah : “Bagaimanakah pemetaan potensi Pajak Daerah di Kota Payakumbuh dari tahun 2013 – 2017?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

Menganalisis pemetaan potensi pajak daerah di Kota Payakumbuh dari tahun 2013-2017, sehingga dari potensi tersebut dapat menjadi landasan untuk mencari solusi dalam merealisasikan potensi pajak daerah di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain :

1. Bagi Objek Penelitian (Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh).
Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan pajak daerah.

2. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Pajak Daerah.
3. Bagi Pembaca, memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pemetaan pajak daerah sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi peneliti lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang analisis pemetaan potensi pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat diambil kesimpulan yaitu:

Pajak daerah Kota Payakumbuh sekitar 50% termasuk kedalam kategori terbelakang, dimana dalam kategori ini proporsi suatu jenis pajak daerah rerata pajak masih kecil ($\frac{Y_i}{\bar{Y}} \leq 1$) dan proporsi tambahan suatu jenis pajak dari total tambahan penerimaan pajak juga kecil ($\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \leq 1$).

Sedangkan untuk kategori berkembang pajak daerah Kota Payakumbuh mencapai 10%, yang mana pada kategori ini proporsi suatu jenis pajak daerah rerata pajak juga masih kecil ($\frac{Y_i}{\bar{Y}} \leq 1$) dan proporsi tambahan suatu jenis pajak dari total tambahan penerimaan pajak cukup besar ($\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$).

Pajak daerah Kota Payakumbuh untuk kategori potensial mencapai 20%, ini merupakan kategori proporsi suatu jenis pajak daerah rerata pajaknya cukup besar ($\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$) dan proporsi tambahan suatu jenis pajak dari total tambahan penerimaan pajak masih kecil ($\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$).

Dan pajak daerah Kota Payakumbuh untuk kategori prima mencapai 20%. Dimana kategori ini terjadi karena proporsi suatu jenis pajak daerah dari

rerata pajaknya cukup besar ($\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$) dan proporsi tambahan suatu jenis pajak dari total tambahan penerimaan pajak juga cukup besar ($\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan adalah:

Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat melakukan pengambilan kebijakan dengan melihat kondisi awal suatu daerah baik dari segi struktur ekonomi dan sosial masyarakat agar pemerintah daerah dapat menentukan seberapa besar pungutan pajak yang akan ditentukan. Serta dengan cara peningkatan cakupan atau tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk yang berkaitan dengan masalah data adanya terobosan baru yang erat kaitannya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yaitu adanya SIN (Single Identification Number) yang merupakan suatu tanda pengenal yang mencakup semua informasi yang diperlukan dalam kaitan dengan pajak. Data yang diperlukan oleh Departemen Keuangan dan Ditjen Pajak meliputi kependudukan, kartu keluarga, nomor sertifikat tanah, surat dan nomor IMB, polis asuransi askes, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, STNK, nomor BPKB pelanggan PDAM, pelanggan telkom, pelanggan PLN, dan jamsostek dan sebagainya yang jumlahnya 32 jenis data. Hal tersebut menyebabkan pengenaan pajak atas obyek pajak dapat dilakukan dengan lebih intensif, dengan menghindarkan wajib pajak dari pengenaan pajak berganda dan masyarakat yang menghindar atau tidak membayar pajak dapat menyadari akan pentingnya pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- <http://dominique122.blogspot.com/2015/05/pengertian-pendapatan-daerah-dan.html>
(diakses pada tanggal 05 mei 2018)
- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/4500/4111> (diakses pada tanggal 05 mei 2018)
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Payakumbuh (diakses pada tanggal 01 juli 2018)
- <http://junaidichaniago.blogspot.co.id/2009/05/mengenal-tipologi-klasen-seri-1.html>
(diakses pada tanggal 05 juni 2018)
- http://nitayudisti.blogspot.com/p/ekstensifikasi-intensifikasi-pajak_31.html (diakses pada tanggal 25 agustus 2018)
- <https://sumbar.antaranews.com/berita/132703/potensi-daerah> (diakses pada tanggal 25 agustus 2018)
- <https://www.radarbanten.co.id/ekstensifikasi-dan-intensifikasi-pajak-daerah/> (diakses pada tanggal 25 agustus 2018)
- <https://www.scribd.com/doc/2908449/modul-4-Tipologi-Klassen> (diakses pada tanggal 05 mei 2018)
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2011. *Tentang Pajak Air Tanah*.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2011. *Tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame*.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 09 Tahun 2011. *Tentang Pajak Restoran*.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2011. *Tentang Pajak Penerangan Jalan*.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2011. *Tentang Pajak Parkir*.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2011. *Tentang Pajak Hiburan*.